BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum partai AKP berkuasa, dahulu Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1923, Kemal ingin Turki melepaskan segala unsur yang berhubungan dengan Islam yang ada di zaman Ottoman dan memperbarui dengan Sekularisme dan Westernisasi, perubahan ini membuat politik luar negeri Turki lebih dekat ke arah Barat dan hubungan ke wilayah Timur tidak berimbang seperti kedekatannya dengan Barat. Turki juga memiliki sebuah masalah dengan negara-negara Timur Tengah seperti Iraq dan Suriah yang menyebabkan hubungannya renggang di sekitar kawasan Timur Tengah. Namun pada tahun 2003 ketika partai AKP *(Adalet ve Kalkinma Partisi)* atau Partai Keadilan dan Pembangunan berhasil berkuasa, Turki mencoba kembali merekonsiliasi hubungannya yang buruk di masa lalu dengan Timur Tengah. (Hati, 2016, hal. 2-3)

Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2007 Abdullah Gul resmi menjadi presiden Turki yang ke-11, Ia berasal dari partai AKP yang dipimpin oleh Recep Tayyeb Erdogan. (Wikipedia) Namun, kemenangan partai AKP membuat partai oposisi dan militer menjadi gelisah, mereka mengkhawatirkan berkuasanya partai AKP akan dapat mengikis nilai-nilai sekulerisme yang ada di Turki, sehingga Militer maupun oposisi mencoba menghalangi Abdullah Gul untuk mencapai istana negara. Militer dan kalangan sekuler Turki curiga terhadap Gul yang menyimpan agenda Islamis, mereka menyampaikan kekhawatirannya atas prospek seorang ibu Negara yang mengenakan hijab di istana kepresidenan. agar tidak menimbulkan konflik dan gejolak dalam negeri terhadap

kalangan yang menjujung tinggi nilai-nilai Sekulerisme, terutama kelompok Sekuler yang dipelopori oleh kekuatan militer yang dapat menjadi ancaman kudeta, Abdullah Gul berjanji untuk tetap menghormati nilai-nilai sekuler di Turki. (BBC, 2007)

Di masa kepemimpinannya, Gul menunjukkan bahwa ia adalah seorang diplomat yang berpengalaman, Gul berusaha memanfaatkan fungsi negaranya untuk menjadikan Turki sebagai jembatan antara kawasan Barat dan Timur. (DW.Com, 2007) Turki juga menjadi penengah di antara Negara-negara yang sedang berkonflik dan Gul yakin bahwa Turki bisa menjadi model untuk ditiru oleh negara lain, seperti contohnya pemimpin dari Ennahda Tunisia yaitu Rached Ghannouchi pernah mengatakan, "Kami belajar dari pengalaman Turki, khususnya terkait dengan situasi damai antara Islam dan modernisasi yang dicapai negeri itu.", tidak hanya di Tunisa, Turki juga terus memberikan pengaruhnya ke negera lainnya. (Pipes, 2011)

Semenjak kemenangan partai AKP, perubahan kebijakan politik dalam negeri Turki mulai terlihat, budaya demokratis mulai berkembang dan konstitusi sekuler tidak sekaku seperti periode sebelumnya, kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia sudah mulai dijunjung tinggi, hampir semua golongan mendapat perhatian oleh pemerintah. Turki juga merubah politik luar negerinya yang semula kedekatannya dengan kawasan Barat sangat erat kemudian secara perlahan menarik kedekatannya dengan Barat, Turki merubah doktrin politik luar negerinya menjadi konsep *Strategic Depth* dan *Zero Problem* yaitu memanfaatkan kelebihan Turki secara geografi, budaya dan pengaruh sejarah yang digunakan sebagai alat interaksi Turki dalam kancah Internasional dan untuk melakukan hubungan yang seimbang terhadap negara-negara di kawasaan lainnya. Dengan begitu, strategi politik luar negeri Turki yang baru ini dapat menjadi keselamatan dan keamanan nasional tanpa harus melalui pembatasan dan pengisolasian diri, melainkan

dengan keterbukaan dan penerapan politik *Soft Power* kepada negara tetangga. (Budiana, 2015, hal. 1-7)

Dengan arah dan orientasi politik yang baru, Turki bekerjasama dengan banyak negara salah satunya bekerjasama terkait isu kemanusiaan (Pengungsi) di belahan dunia seperti yang terjadi di Iraq, Suriah, Palestina hingga ke Myanmar (Arakan). Ketika kerusuhan yang terjadi pada 28 Juni 2012 antara agama Buddha dan Islam di Myanmar, banyak muslim Rohingya yang menjadi korban dan hilangnya tempat tinggal mereka, Turki datang membantu Etnis Rohingya yang terusir dan tidak diakui oleh negaranya sendiri, mereka dibantai dengan kejam dengan tujuan untuk membersihkan Etnis Rohingya dari Arakan. Menurut data yang disampaikan oleh Human Right Watch pada 1 Agustus 2012, masyarakat etnis Rohingya ditahan ramai-ramai kemudian dibunuh dan diperkosa oleh pasukan keamanan. Jatuhnya korban akibat kerusuhan ini mencapai hingga 800 ribu orang. Etnis ini tidak dipertimbangkan maupun diakui sebagai salah satu etnis dan agama di negara tersebut. (Choirul, 2012)

Pembantaian ini bisa di bilang sebagai Tindakan Genosida, yaitu sebuah kejahatan kemanusiaan, yang melakukan penyiksaan, pembunuhan, pengusiran, pembakaran, pengambil alihan tanah dan barang, yang dilakukan baik secara sengaja sistematis oleh penguasa atau membiarkannya dengan massif atas dasar motif berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Genosida terkadang disamakan dengan *ethnic cleansing*, dimana unsur suku, dan kesamaan agama, serta identitas sejarah, serta budaya lainnya. Tudingan masyarakat internasional terhadap kasus *genocide, massacre*, atau *ethnic cleansing* terhadap minoritas Rohingya telah menjadi isu penting bulan Agustus 2012. (Thontowi, 2013, hal. 41) Dan kejahatan ini termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia, karena kebebasan dan kemerdekaan tidak lagi di dapat oleh Etnis Rohingya.

Dampak dari pembantaian ini menjadikan etnis Rohingya sebagai pengungsi. Pengungsi adalah sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan. Kepergian mereka ke tempat atau ke negara lain bukan atas keinginan diri pribadi tetapi karena terpaksa karena tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu, sehingga timbulah pelanggaran terhadap hak asasi pengungsi yang tidak dapat dihindari.

Pengungsi Rohingya ini mencapai sekitar 75 ribu di negara bagian Myanmar Rakhine kemudian meningkat dari perkiraan awal pemerintah sekitar 50 ribu pengungsi pada bulan Juni. Juru bicara Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa (UNHCR) Adrian Edwards mengatakan : “bahwa ada kebangkitan kekerasan di negara bagian Rakhine Myanmar barat pada awal Agustus, di mana lebih dari 4.000 orang mengungsi setelah rumah mereka dibakar.” (Hizbut Tahrir Indonesia, 2012) Berdasarkan tujuan utama UNHCR adalah memberikan keamanan dan hak dari para pengungsi. Menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka dan mendapat tempat yang aman di negara lain, UNHCR mencarikan solusi jangka panjang bagi pengungsi dengan membantu pengungsi memulangkan ke negara asal mereka, jika kondisi kondusif untuk kembali dan mengintegrasikan di negara-negara suaka atau memukimkan kembali di negara ketiga. (Januari, 2013, hal. 220-221)

Pada tanggal 8 Agustus 2012 istri Perdana Menteri Turki yaitu Emine dan Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu pergi mengunjungi warga Rohingya yang berada di Arakan, sebelum kedatangnnya di Myanmar, Davutoglu mengatakan bahwa pemerintah Myanmar dilaporkan telah membunuh ratusan orang, tetapi para pejabat

muslim di Rakhine yang memiliki kontak dengan Ankara menjelaskan fakta yang terjadi dan menyebutkan korban yang berjatuhan dikalangan Muslim mencapai hingga ribuan. (Lahnie, 2012)

Menteri Luar Negeri Ahmed Davutoglu dan istri Perdana Menteri menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Etnis Rohingya senilai US$ 2 Juta (Rp. 19 Miliyar). Bantuan ini diberikan izin untuk masuk oleh pemerintah Myanmar dikarenakan bantuan kemanusaan ini melalui badan organisasi PBB, bantuan kemanusiaan ini datang tidak hanya dari pemerintahan Turki saja, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga datang untuk membantu masyarakat Rohingya yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik sektarian.. (Maharani, 2012) Menteri Luar Negeri Davutoglu juga diperkirakan akan melakukan perundingan formal untuk mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan Turki untuk pengungsi yang berada di wilayah Arakan dan membahas cara untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Myanmar dan Turki. (Furqon, 2012)

Dalam kedatangan Davutoglu ke Myanmar, ia melakukan pertemuan resmi dengan sejumlah pemimpin Myanmar. Salah satunya Davutoglu bertemu dengan Presiden Thein Sein, Davutoglu juga menyampaikan rencana Turki untuk membuka kedutaan besar Turki di Myaanmar, dan keinginan Turki ini di sambut dengan baik oleh presiden Thein Sein. (Republika.co.id)

Dalam isu pembantaian ini kemudian dibicarakan lebih lanjut oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI. pembahasan ini di bicarakan lebih lanjut dalam Pertemuan KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi) ke-12 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 berlangsung di Kairo, Mesir dengan tema *The Muslim World : New Challeges and Expanding Opportunities.* Presiden Abdullah Gul juga ikut serta dalam membahas beberapa persoalan global seperti masalah Palestina, minoritas Muslim di negara non-anggota OKI, dan Revolusi Arab. Mengenai masalah

minoritas Muslim di negara-negara non-anggota OKI, Komunike Kairo antara lain menyoroti penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Komunike Kairo meminta pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah-langkah serius untuk melindungi HAM, termasuk masalah kewarganegaraan komunitas Rohingya dan membuka akses bantuan kemanusiaan dari komunitas Internasional. (Kementrian Kesekretariatan Negara RI, 2013)

Pada pemilu Turki selanjutnya, Partai Keadilan dan Pembangunan berhasil kembali meraih kemenangan dengan kandidat presiden yaitu Recep Tayyip Erdogan yang kemudian resmi menjadi presiden pada tanggal 28 Agustus 2014, Erdogan juga mencapai masa kejayaannya yang membawa perubahan terhadap politik Turki. Di bawah kepemimpinan Erdogan, bantuan kemanusiaan yang diberikan terhadap Rohingya masih terus dilakukan hingga saat ini.

Pada tanggal 19 Mei 2015 pertemuan di Istana Cankata, Ahmed Davutoglu menyampaikan bahwa pemerintahan Turki masih terus berusaha dan melakukan yang terbaik untuk pengungsi Rohingya. Pemerintah Turki bekerja sama dengan Organisasi Intenasional untuk Migrasi (IOM) dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menggunakan kapal Angkatan Bersenjata Nasional Turki untuk melakukan pencarian terhadap Etnis Rohingya, mereka mencari pengungsi yang terombang ambing di sekitar Asia Tenggara, tujuannya untuk melindungi, mengarahkan, memberi bantuan makanan dan diberikan tempat tinggal untuk Etnis Rohingya yang statusnya sebagai pengungsi. Diperkirakan 4000 ribuan Rohingya serta imigran Bangladesh terdampar disekitar Thailand, Indonesia dan Malaysia. (Hurriyet Daily News, 2015)

Pada tahun 2016 Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu datang berkunjung ke Myanmar, dalam pertemuannya dengan Aung San Suu kyi

membicarakan persoalan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Cavusoglu menekankan tujuan Turki untuk membantu semua pihak di wilayah miskin Rakhine, bantuan yang akan diberikan ini tidak memandang suku, bahasa maupun agama, Turki akan membantu membuat klinik, sekolah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan, akan tetapi proyek ini tidak ada paksaan oleh pihak Turki, semua tergantung persetujuan yang di putuskan oleh pihak Myanmar, dalam empat tahun semenjak dibuka kedutaan besar Turki di Myanmar pada tahun 2012 Turki telah meningkatkan bantuan kemanusiaannya dan memberikan kontribusi dana sebesar $ 13.000.000 terhadap sektor kesehatan dan pendidikan, Turki mengatakan akan mendukung langkah positif yang diambil, dan melalui TIKA [Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki] pemerintahan Turki akan terus memberikan bantuan kemanusiaan, pemerintah Turki juga membahas persoalan kewarganegaraan Rohingya yang saat ini keberadaannya tidak diakui sebagai warga negeara. (Agency, Middle East Updat, 2016)

Konflik ini juga mendapat perhatian dari negara-negara anggota yang telah meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi dan negara Turki juga merupakan salah satu anggota dari konvensi 1951 dan protokol 1967 (Putri, 2016, hal. 3) yang berarti Turki harus menjujung tinggi hak asasi manusia, dan sudah menjadi sebuah kewajiban untuk negara-negara yang telah meratifikasi terkait soal Konvensi 1951 untuk membantu pengungsi.

B. Rumusan Masalah

Dalam proposal skripsi ini, pembahasannya memfokuskan penjelasan terhadap kebijakan Turki untuk membantu Etnis Rohingya di Myanmar. Adapun

rumusan masalahnya sebagai berikut : “Mengapa Turki membuat kebijakan untuk memberikan bantuan terhadap Etnis Rohingya?”

C. Kerangka Pemikiran

Teori adalah sebuah alat yang digunakan untuk merangkai dan menggabungkan konsep-konsep yang menjadi suatu penjelasan untuk menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Teori adalah sebuah pandangan atau asumsi yang telah atau sudah terjadi. Di dalam bukunya Mohtar Mas`oed menjelaskan teori menurut McCain dan Segal sebagai serangkaian statement yang saling berkaitan (yang terdiri dari) : 1. kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep dasar teori itu; 2. Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu-sama-lain; 3. Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamat empirik (yaitu hipotesa). (Mas`oed, 1990, hal. 185-187)

Untuk menjawab Rumusan Masalah di atas, penulis menggunakan Teori Konstruktivisme yang dipopulerkan oleh Alexander Wendt dimana ia memiliki fokusnya tersendiri yaitu konstruksi sosial yang ada dalam kehidupan digunakan sebagai kacamata dalam melihat sebuah fenomena khususnya dalam Hubungan Internasional. Sebagai teori alternatif yang ada dalam Hubungan Internasional, konstruktivisme memiliki pandangannya tersendiri terhadap karakter sifat manusia. Menurut konstruktivisme, dunia sosial bukanlah sesuatu yang *“Given”*, dunia sosial merupakan wilayah intersubyektif yang berarti dunia sosial sangat

berarti bagi masyarakat hidup didalamnya, dunia sosial dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. (Jackson & Sorensen, 2009, hal. 307-310)

Wendt menganggap negara adalah unit analisis yang penting bagi fenomena Hubungan internasional, dimana struktur utama dalam sistem negara lebih bersifat intersubyektif ketimbang material, identitas dan kepentingan negara dapat membangun sebuah struktur sosial. Dalam pandangan Wendt, Struktur Sosial tidak hanya dibentuk berdasarkan nilai mateil saja, akan tetapi adanya peran nilai nonmateril seperti cara pandang, ide, dan Nilai. Dalam hal ini yang berarti sebuah identitas dapat menciptakan struktur sosial (Kebijakan). Identitas ini muncul dan terbentuk ketika seorang aktor melakukan interaksi terhadap aktor lainnya melalui proses yang berulang ulang (Intersubyektivitas) dan kemudian akan menciptakan definisi siapa *''Self''* dan siapa *''Other''* berdasarkan pada karakteristik yang ditunjukkan oleh masing-masing aktor. (Febriar, 2016, hal. 66)

Dalam penelitian bantuan kemanusiaan Turki kepada etnis Rohingya ini berdasarkan adanya kesamaan identitas dan juga Turki merupakan negara yang menjunjung tinggi sebuah demokrasi dan hak asasi manusia, maka dari itu kedatangan Turki untuk membantu etnis Rohingya sebagai tindakan Turki untuk memanusiakan manusia.

Turki di bawah kepemimpinan *Adalet ve Kalkinma Partisi* mulai menerapkan ajaran-ajaran Islam dan ini terlihat ketika pemerintahan AKP dalam menjalankan politik menggunakan nilai-nilai Islam, Erdogan meyakinkan rakyatnya bahwa dengan identitas Islam, Turki mampu mengembalikan kejayaannya seperti kekhilafahan Utsmani yang kuat dalam segi pertahanan, dan

juga ekonomi, dengan keyakinan bahwa Islam adalah Solusi *(Al-Islam huwa Al-Hall).* Dan ini dibuktikan oleh Erdogan dengan membangkitkan kembali Turki dari julukan "*The Sick Man in Europe"* dan mampu berkontribusi dalam menciptakan perdamaian. Erdogan mampu memainkan perannya dalam diplomasi internasional, baik dengan cara *soft approach* maupun dengan cara-cara yang tegas.

Erdogan mengembalikan kedudukan dan hubungan internasional Turki menjadi lebih baik dan strategis dengan menerapkan Politik Multi Dimensi. Yang dimaksud dengan Politik Multi Dimensi adalah dimana Turki harus mengembangkan Politik Luar Negerinya tidak hanya sebatas kawasan barat dan Amerika Serikat saja, tetapi hingga kekawasan yang lebih beragam, yang berarti Turki juga melakukan rekonsiliasi terhadap Negara lain yang pernah berkonflik terhadap Turki dengan damai karena tujuan Turki untuk menjadi poros bukan hanya dalam pengertian geografinya saja, melainkan dari segi historis, kebudayaan, nasionalisme, Hingga keagamaan. (Taghian, 2016, hal. 254)

Kemudian identitas Muslim yang coba dibangun oleh Erdogan melalui beberapa perubahan kebijakan, salah satunya yaitu mulai kembali menggunakan bahasa Arab dimana pada masa pemerintahan Attaturk wajib menggunakan bahasa latin. Dalam bidang pendidikan khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Erdogan berencana akan menerapkan jam pelajaran tambahan agama Islam selama satu jam dalam satu minggu. Untuk jenjang yang lebih tinggi, ia berencana untuk membuat universitas Istanbul menjadi pusat pembelajaran Islam dan akan membangun

masjid di 80 universitas Turki. Dari penelitian ini berarti Identitas seorang pemimpin atau yang memiliki pengaruh tersebut merupakan variable yang independen dan mampu untuk menciptakan suatu tindakan atau perilaku sebuah negara dalam mempengaruhi pengambilan keputusan didalam negeri maupun di luar negeri. (Febriar, 2016, hal. 65)

Berarti identitas itu sendiri mampu membentuk perilaku sebuah negara tergantung pemimpin dan aktor-aktor yang berpengaruh didalamnya, identitas tersebut tentu akan mempengaruhi dan merubah setiap tindakan negara kepada negara lain, dilihat dari identitas kepala negara dan aktor elit Turki dibawah partai AKP memiliki latarbelakang beragama muslim yang berarti sudah kewajiban mereka untuk membantu saudara muslim lainnya, dan dalam penerapan *Strategy Depth* dan *Zero Problem* yang dijalankan Turki ini diharapkan mampu untuk memberikan pengaruhnya kepada internasional dan pembentukan citra Turki yang cinta perdamaian, hegemoni yang positif tidak hanya di kawasan tertentu namun mencapai hingga ke belahaan dunia.

D. Hipotesa

Berdasarkan dari uraian di atas dapat ditarik hipotesa bahwa alasan pemerintahan Turki membantu Etnis Rohingya di Myanmar dari tahun 2012-2016 adalah : untuk menunjukkan identitas Turki sebagai muslim yang moderat dan menjujung tinggi Demokrasi serta nilai-nilai kemanusiaan dengan dibuktikan melalui bantuannya dalam menyelesaikan masalah Etnis Rohingya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui kebijakan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Negara Turki dalam membantu etnis Rohingya di Myanmar dari tahun 2012-2016. Tujuan penelitian kualitatif ini untuk membandingan dan mengolah data yang sudah terjadi ataupun baru saja terjadi untuk dianalisis dan digunakan sebagai data penulisan pembahasan ini. Pembatasan dalam sebuah penelitian bertujuan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, suatu metode dalam meneliti menggunakan format yang terstruktur, menganalisis dan mengumpulkan data-data yang ada di buku maupun data yang ada di internet (Pengertian Menurut Para Ahli). Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan dari awal kerusuhan yang terjadi kepada Etnis Rohingya pada tahun 2012-2016.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditulis dalam empat bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pada bab ini penulis memaparkan bagian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Kerangka pemikiran, Hipotesa, Jangkauan penulisan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Pada Bab ini penulis akan memaparkan tentang kemenangan Partai AKP di Turki serta bagaimana politik luar negeri Turki dibawa kepemimpinan partai AKP

Bab III Pada Bab ini penulis akan memaparkan tentang sikap Turki terhadap etnis Rohingya

Bab IV Pada Bab ini penulis akan menjelaskan identitas Turki sebagai alasan bantuan Turki terhadap Etnis Rohingya

Bab V Dalam bab ini berisi kesimpulan dari proposal skripsi ini tentang Kebijakan Turki terhadap etnis Rohingya di Myanmar dari tahun 2012-2016